“Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah“
(Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung)

Almanda Primadona

Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Abstract

The performance of local Government interpreted as a reflection of the level of achievement of the implementation of an activity, program, wisdom in realizing the objectives, goals, mission, and vision of the organization in the formulation of an unfinished schematic conveniently located an organization. The purpose of this research is to know the conduct of the performance of local governments, internal auditing and financial management areas, as well as knowing its influence partially and simultaneous.

The methods used in this research is descriptive and quantitative methods with verifikatif approach. This research was conducted in the city of Bandung. The statistical test used is the pearson correlation, multiple regression analysis, hypothesis testing and using SPSS applications.

Research results can be noted that the performance of local government: the relationship with internal auditing and financial management areas have a good correlation. Dinas is a local government that its activities providing services.

Keywords: Internal Auditing, Financial Management Area, The Performance Of Local Government

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah (Mardiasmo, 2002).

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas (Indra Bastian, 2002).Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengeloalaan keuangan negara/daerah (Abdul Rohman, 2007).

Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata – mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2004).

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas – tugas organisasi. Menurut arifin sabeni dan iman gozali (1997;67) pengawasan intern merupakan suatu alat pengawasan dari pemimpin organisasi yang berangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan – kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana – rencana dan kebijakan yang telah ditentukan (Wawan dan Lia: 2009).

Instruksi presiden no. 15 tahun 1983 menyebutkan ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan atasan langsung dimaksud dapat melakukan pengamatan setiap saat yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila diperlukan. Sedangkan pengawasan fungsional dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam betas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan. Pengawasan atasan langsung dinilai paling efektif karena jarak antara subjek dan objek pengawasan paling dekat, sehingga dapat dilaksanakan paling intensif, bila perlu dilakukan setiap hari serta terus menerus (Ihyaul Ulum MD, 2004:82).

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, maka keberadaan lembaga-lembaga tersebut semakin diperlukan, namun apakah dengan jumlah lembaga-lembaga pengawasan yang cukup banyak dan pelaksanaan pengawasan yang belapis-lapis dapat memperoleh hasil yang efektif, oleh karena inilah semakin banyaknya waktu yang harus disediakan hanya untuk melayani aparat pengawasan. Hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya untuk kepentingan yang lebih luas, apakah dengan melakukan penyederhanaan terhadap lembaga-lembaga pengawasan yang ada ataukah membuat suatu aturan yang jelas dan tegas dengan tetap berpegang teguh pada upaya-upaya peningkatan kinerja pemerintah (Ihyaul Ulum MD, 2004:85).

Berikut ini adalah tabel IHP (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) tahun 2011 yang menggambarkan hasil pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK (badan pemeriksaan keuangan) disusun untuk memenuhi amanat Undang – Udang Nomor 15 Tahun 2004. (IHP Tahun 2011).

Tabel 1.1
Daftar Laporan Kelemahan Sistem Pengawasan Intern
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010

(nilai dalam jutaan rupiah)

No	Entitas		Kelemahan Sistem Pengawasan Intern	
			Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
Provinsi Jawa Barat			Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
19	136	Kota Bandung	10	10

(Sumber: IHP BPK RI, 2011)

Dari tabel 1.1 daftar laporan kelemahan sistem pengawasan intern di Provinsi Jawa Barat pada Kota Bandung, terdapat sebanyak 10 kasus yang menunjukan kelemahan sistem pengawasan intern yang diakibatkan karena, satuan pengawasan intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. Ini mengakibatkan terjadi Kelemahan dalam sistem pengawasan ankuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 10 kasus yang terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang belum baik, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai (IHP BPK RI,2011).

Faktor utama yang melatarbelakangi kelemahan unsur tersebut adalah sumber daya manusia itu sendiri, dalam hal ini pengawasan intern pada organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan keberadaannya guna membenahi dan meminimalisir kasus serupa.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan intern atasan langsung kepada bawahan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung.
2. Masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu masih terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.
3. Kinerja pemerintahan daerah belum terlaksana dengan baik, belum sesuai dengan target dan tujuan yang telah direncanakan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan intern pada Pemerintahan Kota Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.
3. Bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintahan Kota Bandung.

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran terutama masalah mengenai pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap undang – undang yang mengakibatkan tercipta kinerja pemerintah daerah yang kurang maksimal pada pemerintahan Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan intern pada Pemerintahan Kota Bandung.

1. Untuk mengetahui pengawasan intern pada Pemerintahan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengelolaam keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintahan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis
   Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan pelaksanaan pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya dalam mata kuliah konsentrasi akuntansi sektor publik.
2. Bagi Pemerintahan Kota Bandung
   Memberikan tambahan informasi dan pemasukan bagi pentingnya pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah, sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan instansi pemerintahan.
3. Bagi Pegawai Instansi
   Memberikan informasi tentang pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah, dan dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja masing-masing sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi, memberikan informasi tentang keterkaitan antara pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah.
2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan daya pikir sebagai bagian dari proses belajar, sebagai bagian dari proses belajar, sehingga dapat lebih memahami sebagai aplikasi dan menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dengan praktis yang sesungguhnya di dunia nyata.

II. Kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai Partisipasi penyusunan anggaran, Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

1 Pengawasan Intern

Pengertian pengawasan intern menurut Mulyadi (2001:163) adalah:

"Pengawasan intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen".

Sedangkan menurut SAS (*Statement on Auditing Standard*) mendefinisikan pengawasan intern sebagai berikut:

a. Pengawasan administrasi, meliputi struktur organisasi, prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan transakasi yang diotorisasi oleh manajemen.
b. Pengawasan akuntansi, meliputi struktur organisasi serta prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva dan dipercayainya catatan keuangan perusahaan.

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengawasan intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang, pengawasan intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mancakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan denganpelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah sebagai berikut:

"Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah."

Menurut Halim (2007:24) bahwa keuangan daerah yaitu:

"Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku".

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5 yaitu:

"Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah"

Maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatanyang berisi hak dan kewajiban yang dinilai dari uang maupun barang yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam keranka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3 Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Rohman (2007) kinerja pemerintah daerah adalah :

"merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema stategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu".

Menurut Wawan Et Al (2009) dalam jurnalnya menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah:

"Bagaimana atau sejauh mana Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan-urusannya tersebut".

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis *(strategic planning)* suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam dalam periode tertentu (Abdul Rohman, 2009).

Kinerja pemerintah daerah berati bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan – urusan tersebut. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja dibagi dua yaitu informasi financial dan informasi nonfinancial (Wawan Dan Lia, 2009).

2.2 Kerangka Pemikiran

1 Hubungan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (X_1 dan Y)

Menurut Wawan dan Lia (2009) mengatakan bahwa:

"Pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang dicapai".

Sedangkan menurut Abdul Rohman (2009) mengatakan bahwa:

"Pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik. Fungsi pengawasan intern memonitor apakah perilaku sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atau perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang diinginkan".

2. Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (X_2 danY)

Menurut Mardiasmo (2004) dalam Warsino (2009) menyatakan bahwa:

"Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/dinas/biro/kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki. Semakin bagus tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran maka akan semakin tinggi tingkat kinerja pemerintah".

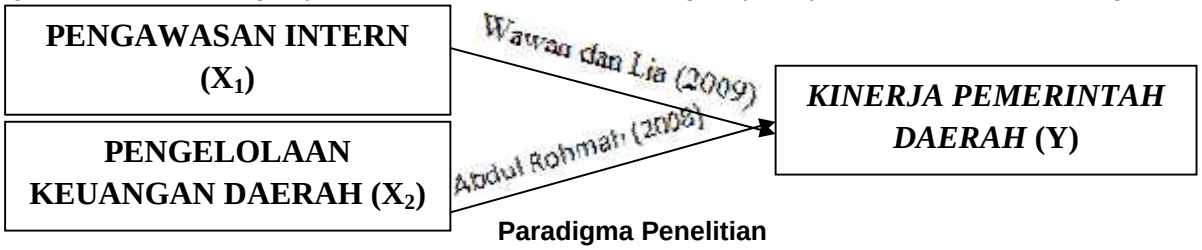
Sedangkan Abdul Rohmah (2008) menyatakan bahwa:

"Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja satu instansi atau organisasi".

Menurut Mulyadi (2001) tanpa didasarkan pada rencana kegiatan jangka panjang yang disusun sebelumnya, anggaran sebenarnya tidak membawa suatu perusahaan ke arah manapun. Maka dari itu dari kegiatan perencanaan sangat penting demi melancarkan pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan penganggaran yang merupakan cakupan atas kegiatan pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan dari setiap program yang telah disusun sehingga mampu mencapai kinerja yang diinginkan.

Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi.

Dari kerangka pemikiran, maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Paradigma Penelitian
Gambar 2.3

2.3 Hipotesis

Penulis mengasumsikan dalam pengambil keputusan sementara (hipotesis) bahwa sebagai berikut :

H_1 :Pengawasan intern pada pemerintah kota bandung sudah sangat baik.
H_2 :Pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota bandung sudah berjalan dengan baik
H_3: Pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada pemerintah kota bandung sudah baik.
H_4 : Diduga Pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah baik secara parsial dan simultan.

III. Objek dan metodel

3.1 Objek Penelitian

Obek penelitian dalam penelitian ini adalah pengawasan intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah pada pemerintah Kota Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dan verifikatif.
Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variable yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, agar penelitian yang dilakukan lebih teratur dan sistematis. Dengan membuat desain penelitian, penyusunan sebuah karya tulis pun akan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik.

Desain penelitian menurut Husein Umar adalah sebagai berikut :

"Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

(2003:123)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan sebuah karya tulis dapat terselesaikan secara cepat dan baik.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Menurut Sugiono terdapat enam aspek utama didalam proses penelitian yaitu:

"1. Rumusan masalah
2. Landasan teori
3. Perumusan hipotesis
4. Pengumpulan data
5. Analisis data
6. Kesimpulan dan saran."

(2010:30)

Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, dengan pertanyaan ini maka akan dapat membantu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan intern pada Pemerintahan Kota Bandung
6. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Bandung
7. Bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung
8. Bagaimana pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Teori dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab semua rumusan masalah penelitian

tersebut. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kuat bukan sekedar perbuatan coba – coba. Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Karena ittu dalam penelitian ini, penulis memasukkan teori – teori yang berhubungan dengan judul yang diambil.

Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual) maka jawaban itu disebut hipotesis. Hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah Terdapat pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung."

Hipotesis masih merupakan jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, peneliti harus malakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan populasi sebanyak 14 dan sampel 14 ditujukan pada Kepala Dinas pada Dinas yang ada di Pemerintahan Kota Bandung.
b. Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena. Mengukur fenomena harus menggunakan alat ukur yang baik yaitu instrumen penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (Variabel independen) yaitu pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel X_1 dan X_2 serta variabel terikat (variabel dependen) yaitu kinerja pemerintahan daerah.
c. Setelah data terkumpul maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu.
d. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran – saran. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Setelah penelitian ini selesai diteliti baru akan muncul kesimpulan dan saran.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini dapat dikatakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur – unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No Kuesioner
Pengawasan Intern (X_1)	"Pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau manajer puncak dan atau pimpinan atau manajer unit atau satuan kerja dilingkungan organisasi dan atau unit atau satuan kerja masing-masing (Nawawi:2002)	Komponen pengawasan intern *1. Control environment;* *2. Risk assessment;* *3. Control activities;* *4. Information and comunication* *5. Monitoring* COSO (*Communication Of Sponsoring Organization*) dalam Santoyo Gondodiyoto (2009:153),	Ordinal	1-8
Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2)	Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Abdul halim, 2002:7)	1. Perencanaan *(Planing)* 2. Penyusunan dan Penetapan APBD *(activity of budget implementation)* 3. Pelaksanaan APBD *(Activity budget implementation)* 4. Pertanggung Jawaban *(Budget monitoring and control)* (Permendagri No.58 Tahun 2005)	Ordinal	1-8
Kinerja Pemerintah	Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu	1. Memperjelas tujuan organisasi. 2. Mengevaluasi target akhir. 3. Menunjukan standar kinerja.	Ordinal	1-10

Daerah (Y)	kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning)suatu organisasi. Chabib Soleh dan Suripto (2011:3)	4. Menunjukan efektivitas. 5. Menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling untuk mencapai sasaran. Mardiasmo (2009;128)		

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendapatkan data untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. *Field Reseach* (Penelitian Secara Langsung)
   a. Observasi, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu dinas.
   b. Kuesioner, teknik kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner tertutup. Suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas SKPD Kota Bandung. Dengan harapan mereka bisa memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
   c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan Kepala Sub Bagian Umum , juga beberapa kepala Dinas SKPD / Kepala Sub Bagian Umum, dan pihak – pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
   d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen – dokumen yang terdapat pada Dinas Kota Bandung, LHP 2011, peraturan pemerintah, buku – buku yang ada.
2. *Library Reseach* (Studi Pustaka)

   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku, jurnal, artikel, peraturan perundang – undangan , website dan penelitian – penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.2.4 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah signifikan, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial (individual), dilakukan uji signifikansi. Pengujian dimulai dari pengujian simultan, dan apabila hasil pengujian simultan signifikan dilanjutkan dengan uji parsial.



D n Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika F_{hitung} jatuh di daerah penolakan atau Fhitung>Ftabel (0>0), maka Ho ditolak (diterima), artinya dari uji ini bahwa secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif

1. Pengawasan Intern

Pada variabel pengawasan intern terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu *control environment, risk assessment, control activities, information dan communication, serta monitoring*. Dari tabel penelitian dapat dilihat bahwa total persentase yang diperoleh oleh variabel pengawasan intern adalah sebesar 84,42% jika melihat pedoman dari Umi Narimawati, 2010:46 nilai tersebut termasuk dalam kriteria kriteria baik karena terletak pada rentang interval antara 84,01 – 100, namun belum mencapai tingkat ideal (100%) yang diharapkan.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Variabel pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu perencanaa, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban. Dari tabel penelitian dapat dilihat bahwa total persentase yang diperoleh oleh variabel pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 83,92% jika melihat pedoman dari Umi Narimawati, 2010:46 nilai tersebut termasuk dalam kriteria baik karena terletak pada rentang interval antara 68,01-84,00, namun belum mencapai tingkat ideal (100%) yang diharapkan.

3. Pengawasan Intern

Sedangkan variable kinerja pemerintah daerah terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu memperjelas tujuan organisasi, mengevaluasi target akhir, menunjukan standar kinerja, menunjukan efektivitas, dan menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling untuk mencapai sasaran. Dari table penelitian dapat dilihat bahwa total persentase yang diperoleh oleh variabel kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 80,33% jika melihat pedoman dari Umi Narimawati, 2010:46 nilai tersebut termasuk dalam kriteria baik karena terletak pada rentang interval antara 68,01-84,00, namun belum mencapai tingkat ideal (100%) yang diharapkan.

4.2 Analisis Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji penerapan pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerntah daerah maka dilakukan pengujian statistik baik secara simultan dan parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, pengujian uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multi kolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier, analisis korelasi simultan, analisis korelasi parsial, analisis koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS 20.0 dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini :

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, agar model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*) maka akan dilakukan uji asumsi terlebih dahulu. Berdasarkan output spss di atas, diketahui nilai *tolerance* untuk seluruh variabel adalah sebesar 0,801 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk kedua variabel bebas lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pelanggaran asumsi multikolinieritas diantara variabel bebas.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak pada variabel bebas dan variabel terikat. Uji normalitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *kolmogorov-smirnov test.* Dari output spss hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov* di atas, diperoleh nilai signifikansi (asymp. Sig. *(2-tiled)*) untuk variabel pengawasan intern (X1) sebesar 0,406 pengelolaan keuangan daerah (X2) sebesar 0,604 dan kinerja pemerintah daerah (Y) sebesar 0,445, nilai tersebut memiliki berada di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yang digunakan memiliki data yang berdistribusi normal.

a. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan output spss di atas, diketahui nilai *tolerance* untuk seluruh variabel adalah sebesar 0,801 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF untuk kedua variabel bebas lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pelanggaran asumsi multikolinieritas diantara variabel bebas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji gejala heteroskedastisitas digunakan pengujian dengan menggunakan diagram *(scater plot)*, dengan hasil, diketahui bahwa titik-titik yang diperoleh tidak membentuk pola tertentu yang menunjukan bahwa data yang di uji tidak memiliki masalah hetersokedastisitas.

Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan diketahui semua pengujian tidak menghasilkan pelanggaran asumsi klasik. Dengan demikian maka data layak dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

i. Persamaan Regresi Linier Berganda

Persmaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

dimana :

Y = Variabel terikat (Kinerja Pemerintah Daerah)

a = Bilangan konstanta

b_1, b_1 = Koefisien regresi

X_1 = Variabel bebas (Pengawasan intern)

X_2 = Variabel bebas (Pengawasan Intern)

Berdasarkan output diatas diperoleh nilai a = 2,417 koefisien regresi b_1 sebesar 0,500 dan b_2 0,539. Sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2{,}417 + 0{,}500\ X_1 + 0{,}539\ X_2$$

Nilai a dan b_i dalam persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a = 2,417 = Artinya jika kedua variabel bebas bernilai 0 maka kinerja pemerintah daerah akan bernilai 2,417.

b_1 = 0,500 = Artinya jika pengawasan intern meningkat, maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,500.

b_2 = 0,539 = Artinya jika pengelolaan keuangan daerah meningkat, maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,539.

ii. Analisis Korelasi Simultan

Analisis korelasi simultan berfungsi untuk mecari seberapa kuatkah hubungan yang terjadi antara kedua varabel bebas secara bersama-sama terhadap varibel terikat.

Berdasarkan hasil output diatas dapat diketahui nilai koefisien korelasi berganda yang diperoleh adalah sebesar 0,616. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, dimana semakin baik pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan intern maka akan diikuti oleh semakin baiknya kinerja pemerintah daerah.

iii. Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial berfungsi untuk mencari kuatnya hubungan yang terjadi antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan output SPSS tersebut dapat diketahui nilai hubungan yang terjadi antara kedua variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah dengan uraian sebagai berikut:

- Nilai korelasi yang diperoleh antara pengawasan intern dan kinerja pemerinth daerah adalah sebesar 0,525 termasuk dalam kategori hubungan yang cukup baik, nilai korelasi bertanda positif yang menandakan bahwa hubungan yang terjadi antara pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah adalah searah.
- Nilai korelasi yang diperoleh antara pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja poemerintah daerah adalah sebesar 0,522 termasuk dalam kategori cukup baik, nilai korelasi bertanda positif yang menandakan bahwa hubungan yang terjadi antara pengeloalaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah adalah searah.

iv. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat, berikut hasil yang diperoleh dengan menggunakan SPSS.

Berdasarkan hasil output diatas, diperoleh informasi bahwa nilai R-square yang diperoleh adalah sebesar 0,379 atau 37,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara pengawasan intern dan pengelolaan daerah memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja pemerintah sebesar 37,9%. Sedangkan sisanya sebesar 62,1% merupakan pengeruh dari variabel yang tidak diteliti.

Sedangkan untuk melihat pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta* x *Zero Order*. Beta adalah koefisien yang telah distandarkan sedangkan *zero order* adalah korelasi pearson dari setiap variabel bebas terhdap variabel terikat.

Berdasarkan hasil output SPSS diatas, dapat dilakukan perhitungan untuk memperoleh pengaruh parsial dari setiap variabel sebagai berikut:

Pengaruh pengawasan intern = 0,365 x 0,525 = 0,192 / 19,2%
Pengaruh pengelolaan keuangan daerah = 0,360 x 0,522 = 0,188 / 18,8%

Berdasarkan perhitungan diatas maka diketahui bahwa nilai korelasi yang paling dominan diberikan dari pengawasan intern hanya sebesar 19,2% sedangkan pengaruh yang diberikan variabel pengelolaan keuangan daerah yakni sebesar 18,8%.

v. Pengaruh Peneapan Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Secara Simultan

Pengujian secara simultan bertujuan untuk membuktikan apakah pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhdap kinerja pemerintah daerah pada Pemerntah Kota Bandung dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$, Artinya tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel pengawasan intern (X_1) dan pengelolaan keuangan daerah (X_2) terhadap variabel kinerja pemerintah (Y).

$H_a : \beta_0 \neq \beta 1 \neq \beta 2 \neq 0$, artinya ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel partisipasi pengawasan intern (X_1) dan pengelolaan keuangan daerah (X_2) terhadap variabel kinerja pemerintah (Y).

Tingkat signifikansi (α) sebesar 5%.
Dengan menggunakan SPSS, diperoleh output sebagai berikut:

Berdasarkan output diatas diketahui perolehan nilai F hitung sebesar 8,255 dan signifikansi sebesar 0,002. Dengan nilai α = 0,05, $df_1 = 2$, dan $df_2 = 27$ (n-k-l), maka didapat F tabel sebesar 3,354. Karena nilai F hitung > F tabel (8,255 > 3,354) dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh secara simultan dari pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan (bersama-sama) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Bahwa F_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pengawasan intern dan pengelolaan keuanagan daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung.

vi. Pengaruh Pengawasan Intern (X_1) Terhadap Kinerja Pemerintah (Y) Secara Parsial

Dugaan sementara penerapan pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho1 : β1 = 0, Pengawasan intern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kinerja pemerintah daerah.

$Ha_1 : \beta_1 \neq 0$, Pengawasan intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kinerja pemerintah daerah.

Tingkat signifikasnsi (α) sebesar 5%, dk= 27 (n-k-1), sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2,052.
Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari otuput SPSS di atas dapat dilihat bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah karena t-hitung (2,153) > t-tabel (2,052) dan nilai signifikansi sebesar 0,040 maka H_0 ditolak. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 21,53 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pengawasan intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerntah Kota Bandung.

Dapat dilihat dari hasil hipotesis di atas menyatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan identifikasi masalah Masih terdapat kelemahan dalam pengawasan intern atasan langsung kepada bawahan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung, namun jika dilihat dari tanggapan responden mengenai variable pengawasan intern, pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung masih belum optimal.

vii. Pengelolaan Keuangan Daerah (X_2) Terhadap Kinerja Pemerintah (Y) Secara Parsial

Dugaan sementara pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$Ho_2 : \beta_2 = 0$, Pengelolaan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kinerja pemerintah daerah.

$Ha_2 : \beta_2 \neq 0$, Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kinerja pemerintah daerah.

Tingkat signifikasnsi (α) sebesar 5%, dk= 27 (n-k-1), sehingga diperoleh t-tabel sebesar 2,052.

Dari otuput SPSS di atas dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah karena t-hitung (2,126) > t-tabel (2,052) dan nilai signifikansi sebesar 0,043 maka H_0 ditolak . Bahwa t_{hitung} sebesar 2,126 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada pemerintah Kota Bandung.

Dapat dilihat dari hasil hipotesis di atas menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah berdasarkan identifikasi masalah, masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu masih terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Kota Bandung masih belum optimal.

V. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan intern pada pemerintahan Kota Bandung secara umum sudah sangat baik. Berdasarkan lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian,dan pemantauantermasuk dalam kategori sangat baik. Hanya saja dalam penaksiran resiko pemerintah dalam menggunakan mekanisme atau mengenali resiko masih dibawah ideal.

2. pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung sudah berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dengan adanya empat komponen pokok pengelolaan keuangan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta telah sesuainya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Permendagri No.58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung ternyata masih memiliki kelemahan yang ditemukan oleh peneliti, yaitu kemampuan pegawai dalam mengelola keuangan daerah masih kurang, karena terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.
3. Kinerja pemerintah Kota Bandung secara umum sudah baik. Dalam indikator menunjukan efektivitas masih dibawah ideal, artinya masih ada target kinerja dalam pembangunan kota bandung yang belum tercapai sesuai dengan sasaran target. karena masih ada pembangunan yang belum terlaksana dikarenakan masih rendahnya kualitas pembangunan dan kelemahan perencanaan dalam menetapkan target-target capaian kinerja belum efektif.
4. Pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daraerah secara bersama – sama mempunyai korelasi yang cukup dan memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 37,9% terhadap kinerja pemerintahan daerah dimana semakin baik pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintahan daerah pada dinas di Kota Bandung dan sebaliknya, semakin tidak baik pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah maka, kinerja pemerintah daerah akan semakin buruk. Diantara variabel independen, pengawasan intern memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas di wilayah Kota Bandung. Pengawasan intern daerah secara parsial memberikan pengaruh sebesar 19,2% terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara pengelolaan keuangan daerah secara parsial memberikan 18,8% terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah tersebut masih tergolong ke dalam skor yang cukup erat. Disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusia yang masih minim serta sarana serta prasarana masih kurang sehingga muncul tindak kecurangan yang mengakibatkan kinerja pemerintah daerah belum tercapai secara maksimal.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Dinas Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Tingkat pengawasan intern terhadap pegawai pada Pemerintah Kota Bandung sebaiknya dipertahankan dengan cara pimpinan selalu memonitor dan mengontrol kerja para pegawainya agar semua kerja dapat terkontrol dengan baik lagi .
2. Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandung sudah baik. Namun gap yang terjadi antara nilai ideal dan hasil penelitian yang diperoleh menujukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan kualitasnya terutama pada pegawai yang berpendidikan akuntansi, supaya pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih baik lagi.

3. Pada dasarnya kinerja pemerintah daerah sudah baik. Namun belum mencapai nilai ideal. Permasalahan yang terjadi pada pemerintah Kota Bandung kinerja para pegawai masih belum efektif, hal ini mengakibatkan kinerja pemerintah belum berjalan dengan optimal. Maka perlu peningkatan kinerja yang efektif dengan disetai pengawasan intern dan pengelolaan yang baik.
4. Pengaruh pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas di Kota Bandung dinilai baik. Maka dari itu perlu ditingkatkan kembali pengawasan intern dan pengelolaan keuangan daerah agar tercipta kinerja pemerintah yang lebih baik. Dengan kedisiplinan dan kinerja yang lebih ditingkatkan dan diperbaharui. Selain itu peningkatan sarana dan prasarana yang lebih lengkap sangat mendukung pencapaian kinerja pemerintah yang baik.

VI. Daftar Pustaka

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta

Chabib soleh dan Heru Rohmansyah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.* Bandung: Focus Media

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama*, Jakatra:Salemba Empat

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ketiga.*Jakatra:Salemba Empat

Ihyaul, Ulum. 2004. *Akuntasi sektor publik: Suatu Pengatar*. Jakarta: Bumi AksaraIndriantoro, Nur,. Supomo,Bambang, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Penerbit : BPFE Yogyakarta

Mardiasmo.2002.2004.*Akuntansi Sektor Publik*.Andi Offset: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009*. Akuntansi Sektor Publik.* Andi: Jakarta

Narimawati, Umi., Dewi Anggadini, Sri., Ismawati Linna.,2010.*Penulisan Karya Ilmiah.*Jakarta:Penerbit Genesis

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Rivai, Veithzal.2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Bandung: Mandar Maju

Sugiyono.2005,2007. 2010.*Metode Penelitian*.Alfabeta: Bandung

Sugiyono.2008.*Metode Penelitian Bisnis.*Alfabeta: Bandung

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaitatif dan R&D.* Alfabeta: Bandung

Umar, Husein.2003. *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama

Undang-undang No 17, 25,33 Tahun 2004. Tentang keuangan negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerahdan perencanaan penganggaran di daerah

Jurnal :

Abdul, Rohman. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Maksi Vol7 No.2

Abdul, Rohman 2009, *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Di Jawa Tengah).* Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol.9 No.1 ISSN 1412-0852

Arja, Sadjiarto. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan.* Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2 Nopember 2007

Askam Tuasikal. 2008. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah*. Vol.10. No 1. ISSN : 1410-8623

Misni, Erwati. 2009. *Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) terhadap kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah daerah dengan komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating. Vol.102.ISSN:0854-8986*

Mediaty . *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ekonomi Tahun XX, No. 3 Desember 2010.*

Solikhun Arifin, dan Abdul Rohman. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komite Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi.* Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 2 Tahun 2011

Syarifuddin, Muhlis dan Mediaty. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Barru Sul-Sel).* Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 2 Tahun

Wawan Sukmana & Lia Anggarsari. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya) Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009.*

Lampiran :

Tabel 4.12

Rekapitulasi Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengawasan intern

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kriteria
Lingkungan Pengendalian	255	300	85,00	Sangat Baik
Penaksiran Resiko	247	300	82,33	Baik
Aktivitas Pengendalian	258	300	86,00	Sangat Baik
Pemantauan	253	300	84,33	Sangat Baik
Total	1013	1200	84,42	Sangat Baik

Tabel 4.21

Rekapitulasi Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kriteria
Perencanaan	268	300	89,33	Sangat Baik
Penyusunan dan Penetapan APBD	241	300	80,33	Baik
Pelaksanaan APBD	236	300	78,67	Baik
Pertanggungjawaban	262	300	87,33	Sangat Baik
Total	1007	1200	83,92	Baik

Tabel 4.32

Rekapitulasi Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kriteria
Memperjelas Tujuan Organisasi	273	300	91,00	Sangat Baik
Mengevaluasi Target Akhir	280	300	93,33	Sangat Baik
Menunjukan Standar Kinerja	228	300	76,00	Baik
Menunjukan Efektivitas	204	300	68,00	Cukup Baik
Menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya paling baik untuk mencapai sasaran	220	300	73,33	Baik
Total	1205	1500	80,33	Baik

Tabel 4.33
Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengawasan Intern (X1)	,801	1,248
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	,801	1,248

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

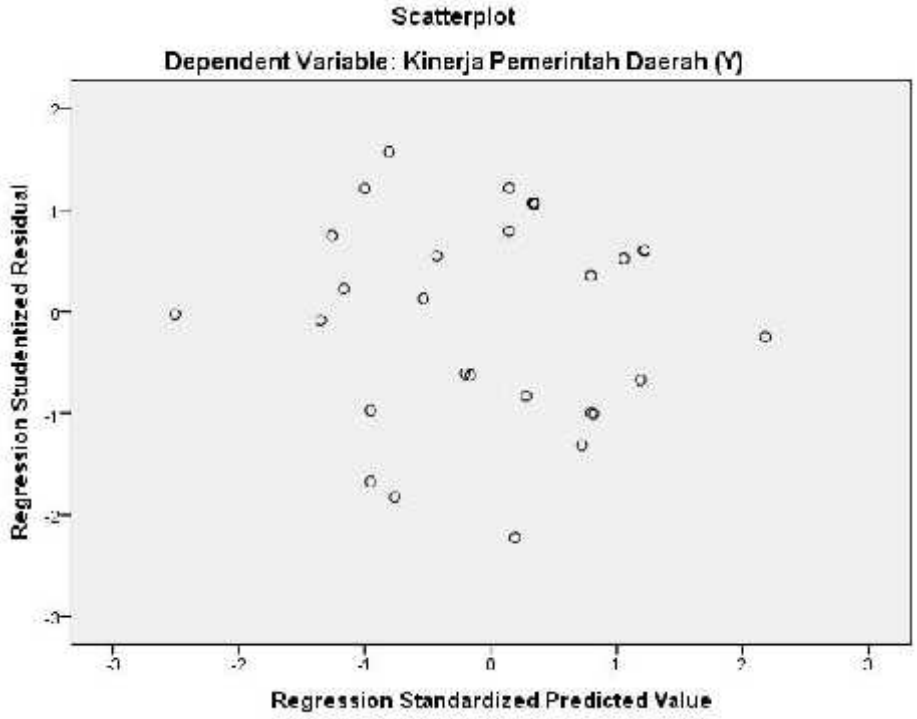
Tabel 4.34
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pengawasan Intern (X1)	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)
N		30	30	30
Normal Parameters[a,b]	Mean	22,7950	22,0522	25,7005
	Std. Deviation	4,15657	3,80349	5,69770
Most Extreme Differences	Absolute	,163	,139	,158
	Positive	,163	,116	,113
	Negative	-,096	-,139	-,158
Kolmogorov-Smirnov Z		,891	,764	,864
Asymp. Sig. (2-tailed)		,406	,604	,445

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Gambar 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. 36
Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,417	5,800		,417	,680
	Pengawasan Intern (X1)	,500	,232	,365	2,153	,040
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	,539	,254	,360	2,126	,043

a. Dependert Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Tabel 4.37
Korelasi Simultan

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,616[a]	,379	,333	4,65165

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Pengawasan Intern (X1)

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.38
Korelasi Parsial

Correlations

		Kinerja Pemerintah Daerah (Y)
Pengawasan Intern (X1)	Pearson Correlation	,525
	Sig. (2-tailed)	,003
	N	30
Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	Pearson Correlation	,522
	Sig. (2-tailed)	,003
	N	30

Tabel 4.39
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,616[a]	,379	,333	4,65165

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Pengawasan Intern (X1)

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Tabel 4.40
Beta* x *Zero Order

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Pengawasan Intern (X1)	,365	,525
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	,360	,522

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Tabel 4.41
Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	357,230	2	178,615	8,255	,002[b]
	Residual	584,221	27	21,638		
	Total	941,451	29			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah (X2), Pengawasan Intern (X1)

Tabel 4.42
Nilai t_{hitung} Masing-Masing Variabel Independen

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,417	5,800		,417	,680
	Pengawasan Intern (X1)	,500	,232	,365	2,153	,040
	Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)	,539	,254	,360	2,126	,043

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah (Y)